EVALUASI PROGRAM AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bhagavat Bahisthadatta
NPP. 32.0484
Asdaf Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: bahistha86@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Suraji, S.Sos., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP)*: IKD activation achievement is still low, far below the regional and national targets in Yogyakarta City.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Digitial Population Identity Activation program at the Population and Civil Registration Office of Yogyakarta City.* ***Method:*** *This research uses a qualitative approach with a descriptive method that aims to analyze the evaluation of the Digital Population Identity Activation program at the Population and Civil Registration Office of Yogyakarta City. The analysis in this study is based on evaluation theory according to Nurcholis (2007: 277-278), which assesses evaluation through four aspects, namely inputs, processes, outputs, and outcomes. Data were collected through in-depth interviews with 4 informants, direct observation, and documentation as supporting data that strengthens the research results.* ***Result:*** *The findings obtained by the author in the research conducted at the Population and Civil Registration Office of Yogyakarta City are that the implementation of the digital population identity activation program is still not fully effective. This is because the output dimension has not been achieved as well as various obstacles such as the diverse society of Yogyakarta City, the lack of public understanding of IKD, and limited human resources, so that further efforts are needed from the Population and Civil Registration Office of Yogyakarta City.* ***Conclusion:*** *The Digital Population Identity Activation Program at the Population and Civil Registration Office of Yogyakarta City has been well implemented, but not yet on target. Target indicators in the output dimension have not been met, and there are still obstacles that require further handling.*

Keywords: *Evaluation, Activation, Digital Population Identity*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih rendahnya capaian aktivasi IKD, jauh di bawah target daerah dan nasional di Kota Yogyakarta. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi program Aktivasi Identitas Kependudukan Digitial di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis evaluasi program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori evaluasi menurut Nurcholis (2007:277-278), yang menilai evaluasi melalui empat aspek, yaitu input, proses, output, dan outcomes. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 4 informan, observasi langsung, serta dokumentasi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil penelitian. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yaitu pelaksanaan program aktivasi identitas kependudukan digital masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena dimensi output belum tercapai serta berbagai kendala seperti masyarakat Kota Yogyakarta yang beragam, kurangnya pemahaman masyarakat tentang IKD, serta terbatasnya sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya penyelesaian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta lebih lanjut. **Kesimpulan:** Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik, namun belum tepat sasaran. Indikator sasaran pada dimensi output belum terpenuhi, serta masih terdapat hambatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Kata kunci: Evaluasi, Aktivasi, Identitas Kependudukan Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, dengan luas wilayah 1,9 juta km² dan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024), menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pendataan dokumen kependudukan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya (Hutasoit, 2017). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan pendataan yang akurat, faktual, dan menyeluruh melalui administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Administrasi ini termasuk dalam urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, dan distribusi bantuan sosial. Administrasi Kependudukan sebagai sebuah sistem, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu penduduk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan (Ripa'i, 2018). Salah satu bentuk dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang diperuntukkan bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-el). Kemudian juga ada KIA, Kartu Identitas Anak (KIA)

juga dapat membantu orang tua dalam mengurus berbagai kebutuhan anak, seperti mendaftarkan anak ke sekolah, mengurus izin perjalanan, dan seterusnya (Setyawan et al., 2024). Tujuan dari penerbitan KTP adalah untuk memberikan identitas resmi serta memenuhi hak konstitusional warga negara. Saat ini, digitalisasi menjadi elemen penting dalam strategi pemerintahan, yang tercermin dalam kebijakan regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.digitalisasi dalam administrasi kependudukan menjadi hal yang penting, di mana Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik. yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan akses terhadap layanan kependudukan (Ripa'i, 2018). Wujud dari penerapan smart governance, yaitu dengan adanya digitalisasi pelayanan administrasi teknologi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif (Fitriana & Arif, 2024). Berdasarkan penelitian (Gatiningsih & Sutrisno, 2017), Karena tingkat kematian dan kelahiran yang rendah, populasi cenderung stabil. Masyarakat kini mengharapkan akses yang cepat dan mudah terhadap layanan, termasuk manajemen kependudukan. Pemerintah memenuhi kebutuhan ini melalui program "Identitas Kependudukan Digital" (IKD), merupakan upaya dalam mendigitalkan layanan kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpusat. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (Astuti, 2022). Digitalisasi ini menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan, serta menjawab tantangan demografis dan geografis yang kompleks (La Tarifu, 2020; Azizah et al., 2022).

Meskipun Kota Yogyakarta telah menghadirkan berbagai inovasi program pelayanan kependudukan, seperti layanan jemput bola, drive-thru, Mall Pelayanan Publik (MPP), serta pemanfaatan media sosial dan kehadiran aktif di berbagai event, angka aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) justru masih tergolong rendah. Hal ini menjadi kontradiksi antara intensitas inovasi dengan partisipasi masyarakat yang minim. Berdasarkan data, capaian aktivasi pada tahun 2024 hanya mencapai 3,96%, dan meningkat sedikit menjadi 5,39% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa berbagai inovasi yang telah dilakukan belum mampu mendorong partisipasi masyarakat secara signifikan.

Implementasi program IKD di Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai inovasi, seperti layanan jemput bola, penggunaan media sosial, serta pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP), tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD masih rendah. Inovasi teknologi telah memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan, memproses, memanipulasi, menyimpan, mengambil dan melaporkan data secara efisien dan andal (Glybovets & Mohammad, 2017).Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hanya 3,96% penduduk yang mengaktifkan IKD, dan sedikit meningkat menjadi 5,39% pada tahun 2025. Permasalahan ini diduga dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, seperti terbatasnya SDM Disdukcapil**,** rendahnya kesadaran masyarakat**,** serta heterogenitas penduduk yang menyebabkan tantangan dalam penargetan program. Sementara itu, faktor pendukungnya meliputi luas wilayah yang kecil**,** sarana dan prasarana yang memadai**,** serta dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap program aktivasi IKD dengan pendekatan evaluasi Nurcholis (2007), yang meliputi dimensi input, proses, output, dan outcomes, guna mengetahui efektivitas pelaksanaannya serta merumuskan solusi atas hambatan yang ada.

Program aktivasi IKD dicetuskan sejak tahun 2022 dan hingga tahun 2025 terdapat peningkatan. Namun, masih saja belum memenuhi target diterbitkannya program IKD yaitu sebesar

30%. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program aktivasi IKD, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program aktivasi IKD. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian terhadap pelaksanaan program aktivasi IKD. Kajian ini diperlukan untuk mengukur evaluasi program aktivasi IKD di Kota Yogyakarta. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Yogyakarta telah dirancang secara komprehensif dengan berbagai inovasi layanan (seperti jemput bola, *drive-thru*, pelayanan di Mall Pelayanan Publik, dan penggunaan media sosial), tingkat aktivasi IKD masih rendah, yaitu hanya mencapai 3,96% pada tahun 2024 dan 5,39% pada tahun 2025. Walaupun IKD telah diluncurkan secara nasional, belum semua instansi layanan publik menerima IKD sebagai dokumen identitas resmi, sehingga masyarakat masih ragu untuk mengaktifkan layanan ini, sehingga menyebabkan rendahnya angka aktivasi IKD. Dari sisi kualitas, SDM Disdukcapil Kota Yogyakarta sudah baik dan terlatih dalam pengelolaan digital. Namun, jumlah SDM yang terbatas tidak mampu mengimbangi beban kerja yang tinggi dalam program aktivasi IKD, sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan dan cakupan yang sempit. Kondisi ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan program aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks evaluasi program maupun konteks aktivasi identitas kependudukan digitalx. Penelitian Zahra Oktaviana Ayuningtyas berjudul *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah* (Ayuningtyas, 2024), menemukan pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi meliputi belum diwajibkannya KIA untuk pendaftaran sekolah, keterbatasan SDM, gangguan jaringan, minimnya sosialisasi, belum tersedia layanan *online*, serta kurangnya fasilitas seperti mesin Anjungan Dukcapil Mandiri. Penelitian Restu Widyo Sasongko berjudul *Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung.* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan IKD di Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai serta integrasi IKD dengan berbagai inovasi layanan publik di daerah tersebut, berdasarkan kerangka teori implementasi dari George C. Edward III (Sasongko, 2023). Penelitian Wempie, Susanti, dan Indriani (2024) mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penerapan IKD. Studi ini menyoroti langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas tersebut untuk mendorong penggunaan IKD di kalangan masyarakat, termasuk upaya sosialisasi dan pelayanan inovatif yang mendukung percepatan aktivasi identitas digital. Penelitian Nanda Pratama Auliak dan Susi Hardjati berjudul *Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan* (Auliak & Hardjati, 2023), menemukan bahwa program "Sabtu Tuntas" di Kabupaten Magetan dinilai efektif dalam sebagian besar aspek seperti aksesibilitas, ketepatan waktu, akuntabilitas, dan kesesuaian kebutuhan. Namun, ada kendala yang perlu diperbaiki, seperti frekuensi layanan yang rendah, keterbatasan sumber daya, dan edukasi masyarakat untuk menghindari praktik calo. Penelitian Ratnasari (2024) di Kabupaten Boyolali meneliti strategi yang

digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan IKD sebagai bagian dari transformasi digital dokumen kependudukan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan jemput bola dan pelayanan terpadu untuk meningkatkan cakupan IKD secara efektif di tingkat kabupaten. Selain itu, Penelitian Nur Azizah, Rahayu Kusuma Dewi dan Cecep Wahyu Hoerudin yang berjudul Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Menemukan bahwa Penelitian ini Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa efektivitas dari pemanfaatan aplikasi Edukcapil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang belum cukup efektif dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk menggunakan aplikasi pelayanan berbasis digital (Azizah et al., 2022). Beberapa penelitian tersebut memberikan landasan penting dalam memahami berbagai strategi serta kendala yang muncul dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital di berbagai daerah, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut, khususnya terkait konteks Kota Yogyakarta.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengangkat objek dan fokus kajian yang belum banyak diteliti sebelumnya, yaitu evaluasi program aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas mengenai strategi dalam meningkatkan jumlah aktivasi IKD atau faktor-faktor administratif dalam pelayanan kependudukan, penelitian ini secara khusus menganalisis evaluasi program inovatif yang diterapkan di tingkat daerah dalam upaya peningkatan jumlah aktivasi IKD. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi dari Nurcholis (2007:277-278) yang mencakup empat dimensi utama, yaitu input, proses, output, dan outcomes. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian administrasi kependudukan karena menilai program pelayanan publik secara komprehensif dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program serupa di daerah lain maupun sebagai bahan evaluasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi program aktivasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2018). Dalam desain penelitian ini, menurut (Creswell, 2019) peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang bertugas untuk menggambarkan secara sistematis hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci evaluasi dari program aktivasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Penulis mengumpulkan data melaui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat, yang

bertujuan untuk menggali faktor penghambat dan upaya peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Simangunsong, 2016).Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Operator Pelaksana Program Aktivasi IKD. Pemilihan 4 informan didasarkan pada relevansi dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan program aktivasi IKD, sehingga dinilai mampu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan efektif di lapangan. Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi menurut Nurcholis (2007:277-278) yang mengukur evaluasi menggunakan empat aspek utama, yaitu input, proses, output, outcomes.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis evaluasi dari program aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Provinsi DIY dengan menggunakan teori evaluasi menurut Nurcholis yang mengatakan bahwa evaluasi dapat diukur berdasarkan empat aspek yakni input, proses, output, outcomes. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Input

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Nurcholis (2007: 277-278) Input merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Disdukcapil. Sebagaimana Disdukcapil Kota Yogyakarta dalam melaksanakan berbagai aktivitas memiliki aspek input yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Pendanaan, Program dan Kegiatan, Sarana dan prasarana, serta modal sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dari segi kualitas, SDM di Disdukcapil Kota Yogyakarta telah memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik dalam menangani sistem digital serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas yang bertugas dalam aktivasi IKD telah mengikuti pelatihan dan memahami prosedur teknis dalam penggunaan sistem identitas digital. Namun, dari segi kuantitas, jumlah SDM yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Keterbatasan ini menjadi kendala dalam percepatan aktivasi IKD, terutama saat terjadi lonjakan permintaan layanan.

Sarana dan prasarana yang lengkap dan mendukung pelaksanaan aktivasi IKD. Fasilitas pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat komputer modern, jaringan internet yang stabil, serta sistem teknologi informasi yang mumpuni, sehingga proses aktivasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kantor Disdukcapil juga memiliki ruang pelayanan yang nyaman serta fasilitas tambahan, seperti layanan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan layanan drive-thru, yang semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus mengantri lama. Dari segi teknologi, sistem yang digunakan dalam proses aktivasi IKD telah terintegrasi dengan database kependudukan nasional, sehingga data yang masuk dapat langsung tercatat dan terverifikasi. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan, tetapi juga meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan identitas digital. Selain itu, adanya layanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan melakukan pengaduan secara daring juga menjadi nilai tambah dalam mendukung keberhasilan program.

3.2. Proses

Berdasar teori yang dikemukakan Nurcholis (2007), Proses adalah kebijakan yang diformulasikan langsung yang memiliki bentuk berupa pelayanan kepada masyarakat. Indikator pada ini meliputi :

a. Alur dan SOP Pelayanan

b. Efektivitas dan Efisiensi

Dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan akses ke identitas digital mereka. Prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang berhubungan dengan kegiatan kerja, biasanya berupa gambar atau uraian tulisan (Tambunan, 2022). Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store untuk pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Setelah aplikasi terpasang, pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi data pribadi yang diminta, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor handphone. Setelah data terinput, pengguna akan diminta untuk melakukan swafoto (selfie). Swafoto ini berfungsi sebagai bagian dari sistem face recognition (pengenalan wajah) yang digunakan untuk memverifikasi identitas pemilik akun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa identitas digital benar-benar dimiliki oleh individu yang bersangkutan dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan data. Setelah proses pengenalan wajah selesai, pengguna harus memindai QR code untuk menyelesaikan aktivasi IKD. Namun, saat ini pemindaian QR code masih harus dilakukan dengan pendampingan petugas Disdukcapil, sehingga layanan ini belum sepenuhnya dapat dilakukan secara mandiri secara daring. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kasus penipuan yang marak terjadi belakangan ini. Dengan adanya pengawasan petugas dalam proses verifikasi, risiko penyalahgunaan identitas dapat diminimalisasi, sehingga keamanan data masyarakat tetap terjaga. dasar hukum merupakan hal yang penting juga karena merupakan dasar dalam menentukan kewenangan suatu lembaga. Tanpa dasar hukum yang jelas, pemrosesan data dapat melanggar hak privasi individu (Becker et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi efektivitas program aktivasi IKD di Kota Yogyakarta masih belum optimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya angka aktivasi. Hingga tahun 2024, aktivasi IKD baru mencapai 3,96%, dan meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2025 menjadi 5,39%, angka ini masih jauh dari target yang diharapkan. Rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya berhasil dalam mendorong masyarakat untuk beralih ke identitas digital.

Dari segi efisiensi, Disdukcapil Kota Yogyakarta telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, termasuk layanan drive-thru, pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), serta sistem jemput bola yang bertujuan untuk mempercepat proses aktivasi. Namun, pemanfaatan fasilitas ini belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan angka aktivasi yang signifikan. Beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya efektivitas dan efisiensi program ini antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah SDM, serta belum meratanya penerimaan IKD oleh berbagai instansi layanan publik.

3.3. Output

Output atau keluaran dari program aktivasi IKD ini adalah dalam konteks hasil yang dihasilkan dari program aktivasi IKD seperti pendataan masyarakat yang merupakan dasar utama untuk melakukan kegiatan kegiatan aktivasi IKD, kemudian capaian peserta aktivasi IKD yang merupakan salah satu sasaran dari Program Aktivasi IKD. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam program aktivasi IKD dan berpartisipasi mengaktivasi IKD.

Indikator pertama dalam dimensi output dalam evaluasi program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta adalah ketepatan sasaran yang dituju. Idealnya, program ini harus menyasar penduduk yang ber-KTP Kota Yogyakarta, karena mereka yang secara administratif terdaftar sebagai warga kota memiliki kewajiban untuk melakukan aktivasi IKD. Pencapaian tujuan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya dalam mencapai sasaran tujuan secara efisien dan efektif (George Robert Terry, 1968). Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi kendala dalam memastikan ketepatan sasaran, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.

Tabel 1
Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivasi IKD

No	Kecamatan	Jumlah yang Sudah Aktivasi	Persentase
1.	Tegalrejo	1.227	4,25%
2.	Jetis	1.257	6,03%
3.	Gondokusuman	1.794	5,35%
4.	Danurejan	978	5,95%
5.	Gedongtengen	591	3,91%
6.	Ngampilan	670	4,80%
7.	Wirobrajan	1.533	7,09%
8.	Mantrijeron	1.502	5,47%
9.	Kraton	1.004	5,92%
10.	Gondomanan	704	6,14%
11.	Pakualaman	507	6,08%
12.	Mergangsan	1.400	5,70%
13.	Umbulharjo	2.802	5,12%
14.	Kotagede	1.340	4,96%
Total		**17.309**	**5,39%**

Sumber : Disdukcapil Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel keterlibatan masyarakat dalam aktivasi IKD diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih tergolong rendah hanya sebesar 5,39%. Keterlibatan masyarakat paling rendah yaitu pada kecamatan Tegalrejo dengan persentase sebesar 4,25%, sedangkan keterlibatan masyarakat tertinggi berada di kecamatan Wirobrajan dengan persentase sebesar 7,09%.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai inovasi pelayanan seperti jemput bola, drive-thru, Mall Pelayanan Publik (MPP), hingga sosialisasi melalui media sosial dan event pemerintah, tingkat aktivasi IKD hingga tahun 2025 baru mencapai 5,39% dari total penduduk wajib KTP, naik dari 3,96%

pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.

Temuan penting dalam dimensi input menunjukkan bahwa meskipun sarana dan prasarana serta fasilitas teknologi di Disdukcapil Kota Yogyakarta sudah tergolong lengkap dan mendukung, jumlah SDM masih terbatas. Kualitas SDM dinilai baik, namun beban kerja yang tinggi membuat mereka tidak mampu menjangkau seluruh target masyarakat secara optimal. Selain itu, pendanaan dari APBD cukup mendukung pelaksanaan kegiatan, tetapi belum memadai untuk memperluas cakupan sosialisasi maupun peningkatan kapasitas pelayanan digital.

Pada dimensi proses, prosedur aktivasi IKD sudah disusun dengan alur pelayanan yang jelas, mulai dari registrasi hingga verifikasi menggunakan QR code dan face recognition. Namun, karena alasan keamanan, proses ini masih harus didampingi petugas dan belum sepenuhnya daring, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Dalam dimensi output, ditemukan bahwa program belum berjalan tepat sasaran. Aktivasi IKD juga dilakukan oleh penduduk luar daerah yang tinggal sementara di Yogyakarta, sehingga data capaian tidak mencerminkan jumlah warga ber-KTP Kota Yogyakarta secara valid. Hal ini turut memengaruhi akurasi evaluasi keberhasilan program.

Terakhir, pada dimensi outcome, dampak nyata program belum terlihat secara signifikan. Adaptasi program untuk digunakan di kehidupan sehari-hari diperlukan. Adaptasi, yaitu kemampuan individu untuk merespons secara efektif dan konstruktif terhadap situasi yang berubah (Hotifah et al., 2022).Salah satu penyebabnya adalah belum semua instansi layanan publik menerima IKD sebagai dokumen identitas sah, sehingga masyarakat belum terdorong untuk melakukan aktivasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan lintas sektor dan peningkatan literasi digital masyarakat, disertai dengan upaya sosialiasasi kepada masyarakat. Sosialisasi adalah proses dimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, norma dan tindakan yang sesuai dengan komunitasnya (Shahr et al., 2019).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Hasil Evaluasi Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan indikator Input, Proses, Output, dan Outcomes menunjukan bahwa program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum secara maksimal. Penulis mengambil kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan pada dimensi Output dan Outcomes, hal ini terlihat dari jumlah aktivasi IKD yang tidak terlalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait dengan terbatasnya waktu dan kurangnya referensi yang dapat mendukung penelitian tentang aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa terkait program aktivasi IKD untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Auliak, N. P., & Hardjati, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. *Journal of Governance and Local Politics*, *5*(1), 67–75.

Astuti, W. (2022). Efektivitas implementasi migrasi kartu tanda penduduk elektronik ke digital. Jurnal Khatulistiwa, 10(1), 55–68. https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/4431

Ayuningtyas, Z. O. (2024). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah*.

Badan Pusat Statistik. (2024, June 28). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html

Becker, R., Chokoshvili, D., Thorogood, A., Dove, E. S., Molnár-Gábor, F., Ziaka, A., Tzortzatou-Nanopoulou, O., & Comandè, G. (2024). Purpose Definition As a Crucial Step for Determining the Legal Basis Under the GDPR: Implications for Scientific Research. *Journal of Law and the Biosciences*, *11*(1), 1–30. https://doi.org/10.1093/jlb/lsae001

Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. PUSTAKA PELAJAR.

Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan ketenagakerjaan.

George Robert Terry. (1968). *Principles of Management*. R. D. Irwin.

Glybovets, A., & Mohammad, A. (2017). E-Government Versus Smart Government: Jordan Versus the United States. EUREKA: Social and Humanities, 3(3), 3–11. https://doi.org/10.21303/2504- 5571.2017.00338

Hotifah, Y., Nawangsari, N. A. F., & Yoenanto, N. H. (2022). Adaptation I-Adapt Measurement in The Context of Guidance and Counseling Teachers. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, *11*(4), 851–873.

Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-el)

Ripa'i, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil*, *6*(1), 67–85.

Setyawan, D. W., Djohan, D., Ilham, M., & Maryani, D. (2024). Implementation Of The Child Identity Card Policy In Serang District, Banten Province. *JOSS : Journal of Social Science* , *3*(6), 1480–1491. https://joss.al-makkipublisher.com/index.php/js

Shahr, H. S. A., Yazdani, S., & Afshar, L. (2019). Professional Socialization: An Analytical Definition. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, *12*(17), 1–14.

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi)*. Alfabeta.

Tambunan, S. M. (2022). Implementation Of Standard Operating Procedures In Increasing Work Productivity Workers Wangi Sedap Catering. *Enrichment: Journal of Management*, *12*(3), 2304–2311.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956